

## Tinjauan Mata Kuliah

Secara keseluruhan mata kuliah IPEM4208 Sistem Pemerintahan Desa membahas mulai dari bagaimana terbentuknya desa hingga desa mulai diatur dengan peraturan perundang-undangan, baik peraturan perundang-undangan pada masa pemerintahan kolonial Belanda, masa pendudukan Jepang hingga masa kini. Pada hakikatnya pemerintahan desa mengemban 3 (tiga) fungsi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yakni fungsi pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pembangunan. Ketiga fungsi tersebut dijabarkan dalam beberapa modul pembelajaran. Fungsi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat diejawantahkan dalam uraian tentang kewenangan, kelembagaan, dan keuangan pemerintahan desa serta mekanisme pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Sedangkan fungsi pembangunan diuraikan dalam modul pengelolaan pembangunan perdesaan. Di samping uraian fungsi pemerintahan desa, dalam modul ini dijelaskan pula tentang eksistensi lembaga kemasyarakatan desa dan beberapa desa adat di Indonesia.

Buku Materi Pokok (BMP) ini terdiri dari 6 (enam) modul yang disusun berdasarkan analisis capaian pembelajaran sehingga lebih memudahkan mahasiswa dalam mempelajari isi mata kuliah Sistem Pemerintahan Desa secara utuh. Setelah mahasiswa mempelajari satu Kegiatan Belajar (KB) disarankan bagi mahasiswa untuk mengerjakan Tes Formatif, yang tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa mengenai materi yang dipelajari. Sebagai layanan bantuan belajar, mahasiswa juga dapat berlatih mengerjakan latihan mandiri dan tutorial *online* yang dapat diakses melalui [www.ut.ac.id](http://www.ut.ac.id) dan halaman tutorial online.

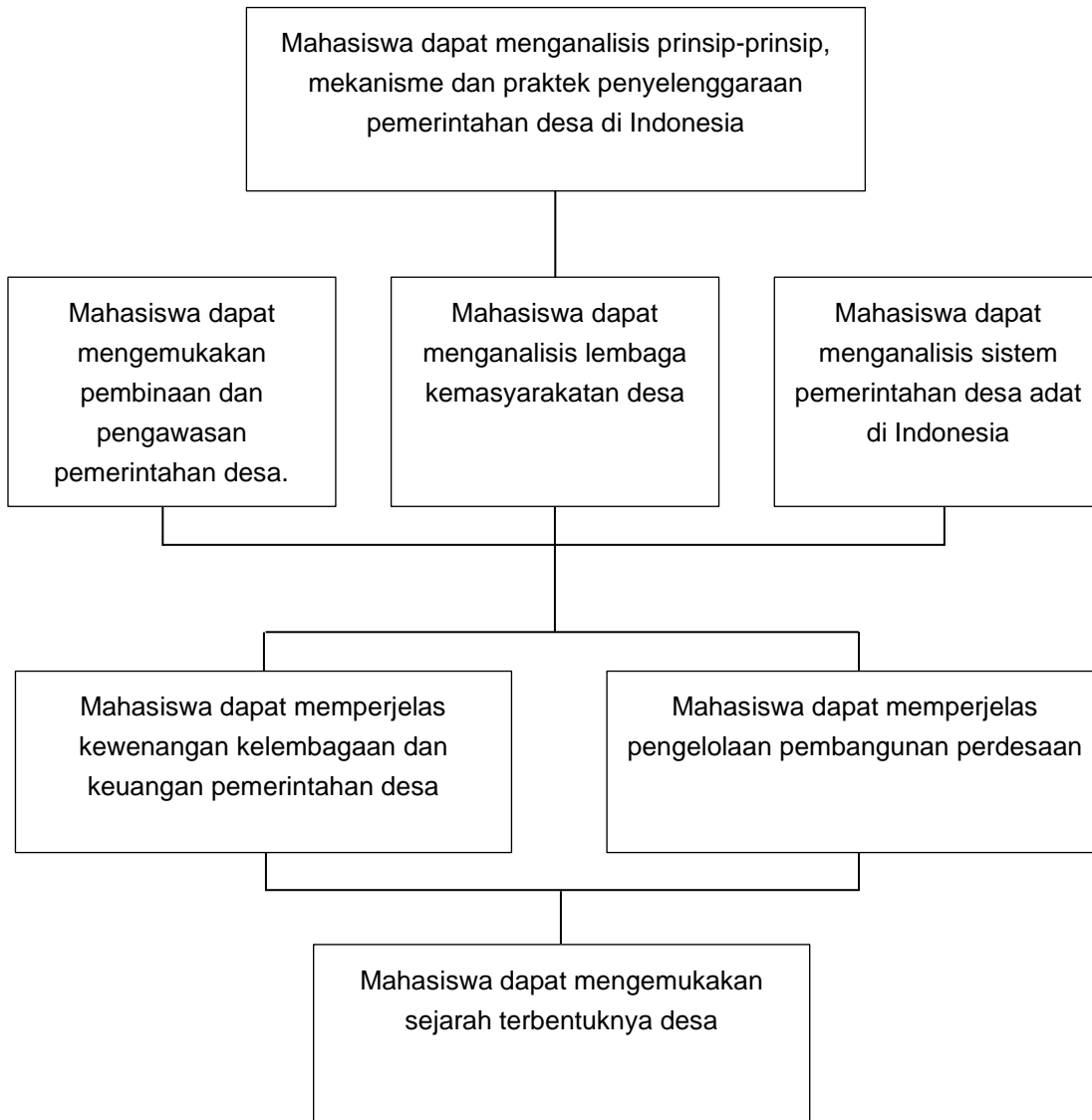
Pembahasan isi mata kuliah IPEM4208 Sistem Pemerintahan Desa dibagi menjadi 6 (enam) modul sebagai berikut.

- Modul 1 : membahas tentang sejarah terbentuknya desa yang dimulai dari proses terbentuknya desa, pemerintahan desa pada masa pemerintahan penjajahan Belanda dan pemerintahan pada masa penjajahan Jepang.
- Modul 2 : membahas tentang bidang-bidang yang menjadi kewenangan pemerintahan desa, kelembagaan pemerintahan desa serta pengelolaan keuangan desa.
- Modul 3 : membahas pengelolaan pembangunan di desa-desa, yang meliputi uraian mengenai kebijakan pembangunan yang diterapkan di desa-desa di Indonesia. Selain itu pada sub pokok bahasan akan dibahas tentang sistem perencanaan pembangunan perdesaan.
- Modul 4 : membahas tentang pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, yang di dalamnya berisi uraian mengenai pembinaan pemerintah tingkat atasnya terhadap pemerintah desa serta mekanisme pengawasan yang diterapkan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
- Modul 5 : membahas eksistensi lembaga kemasyarakatan desa. Dalam pokok bahasan ini dibahas tentang fungsi lembaga kemasyarakatan desa dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah terhadap peningkatan peran lembaga kemasyarakatan desa.

Modul 6 : membahas tentang sistem pemerintahan desa adat di Indonesia. Dalam pokok bahasan ini diuraikan beberapa contoh desa adat yang masih eksis sampai sekarang.

Rangkuman seluruh isi mata kuliah ini dapat dilihat dari Peta Kompetensi berikut.

**PETA KOMPETENSI**  
Sistem Pemerintahan Desa/IPEM4208/2 sks



Capaian Pembelajaran yang diharapkan setelah mempelajari mata kuliah Sistem Pemerintahan Desa adalah mahasiswa mampu menjelaskan prinsip, mekanisme, dan praktik penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia. Secara khusus, kompetensi yang diharapkan setelah mempelajari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan

1. sejarah terbentuknya desa;
2. kewenangan, kelembagaan, dan keuangan pemerintahan desa;
3. pengelolaan pembangunan perdesaan;
4. pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
5. lembaga kemasyarakatan desa;
6. beberapa pemerintahan desa adat di Indonesia.